



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

# **PENDANAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas**

*Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing  
(IG-SDF)*



**30 Januari 2014**



# OUTLINE

- Isu Pembangunan Tingkat Global
- Pembentukan Dan Mandat IG-SDF.
- Lingkup Pembahasan IG-SDF (Clustering, Timetable, Pemikiran Yang Berkembang).
- Beberapa Isu Strategis untuk Indonesia
- Tindak Lanjut Yang Diperlukan Di Tingkat Nasional

# ISU PEMBANGUNAN DI TINGKAT GLOBAL

Mulai adanya pemikiran untuk perumusan agenda pembangunan baru setelah 2015

UN SUMMIT  
on  
MDG 2010



Disepakatinya dokumen "The Future We Want"

UN  
CONFERENCE  
on  
SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
2012  
(RIO+20)

2015  
NEW UN  
AGENDA

# PEMBENTUKAN DAN MANDAT IGSDF

## PEMBENTUKAN IGSDF

### Sidang Majelis Umum PBB Ke-67

1. Resolusi No. 67/555 untuk membentuk proses intergovernmental mengenai SD Goals (SDGs) dalam bentuk Open Working Group (berlaku efektif 22 Januari 2013)
2. Resolusi No. 67/559 untuk membentuk Intergovernmental Committee of Experts on SD Financing /IGSDF (berlaku efektif 21 Juni 2013).

2013

2012

### UN Conference on Sustainable Development (Rio+20)

1. Persetujuan terhadap proses intergovernmental untuk menyiapkan Sustainable Development Goals (SDGs).
2. Kesepakatan untuk mengkaji **aspek pembiayaan** SDGs.

2014

### Sidang Majelis Umum PBB Ke-68

IGSDF akan memberikan **final rekomendasi** mengenai SD Financing.

2015

### New UN Development Agenda

*Sustainable Development* diharapkan dapat menjadi **inti** agenda paska 2015.

# PEMBENTUKAN DAN MANDAT IGSDF

## MANDAT IGSDF

***...to prepare a report proposing options on an effective sustainable development financing strategy “to facilitate the mobilization of resources and their effective use in achieving sustainable development objectives”.***

*Keterangan:*

- 1. Mandat tertuang dalam dokumen Modalities of Work IGSDF*
- 2. Komite akan memberikan laporan kepada Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 2014.*

# LINGKUP PEMBAHASAN IGSDF

## CLUSTERING



### CLUSTER-1

- Assessing the Financing Needs.
- Mapping current flows and emerging trends.
- The impact of domestic and international environments.



### CLUSTER-2 “Mobilization of resources and their effective use”.

- National Public Financing Sources.
- International Public Financing Sources.
- National and International Private Financing Sources.
- Blending Public and Private Financing Sources.
- Relationship between different Financing Sources.



### CLUSTER-3

- Institutional arrangements.
- Policy coherence.
- Synergies and governance issues.

# LINGKUP PEMBAHASAN IGSDF

## TIME TABLE

### Session-1

- 28-30 Agustus 2013
- Organisasi kerja, program kerja, stocktaking isu.

### Session-2

- 2-6 Desember 2013
- Pembahasan hasil preliminary finding

### Session-3

- 3-7 Maret 2014
- Kesimpulan hasil analisa Cluster-1 telah disusun

### Session-4

- 12-16 Mei 2014
- Kesimpulan hasil analisa Cluster-2 dan 3 telah disusun

### Session-5

- 4-8 Agustus 2014
- Dokumen final: kesimpulan dan perumusan opsi-opsi.

CLUSTER-1

CLUSTER-2

CLUSTER-3

# LINGKUP PEMBAHASAN IGSDF

## PEMIKIRAN YANG BERKEMBANG

### CLUSTER-1

#### Assesing Financial Needs

Poverty eradication dan kebutuhan dasar lainnya dari negara berkembang harus mendapatkan prioritas pembiayaan.

Upaya perhitungan kebutuhan pembiayaan SDG diakui tidak mudah. Dapat difokuskan kepada prioritas tertentu, dan mengacu kepada sasaran SDG dari OWG.

Terkait isu lingkungan / *green economy*, disadari bahwa "Cost of Inaction > Cost of Action"

Kebutuhan pembiayaan SD terbesar di sektor Infrastruktur. Private Financing perlu lebih didorong (leveraging)

#### Mapping current flows and emerging trends.

Global saving cukup, namun tidak untuk SDG (menurut UN Task Team Report, Global Saving saat ini mencapai USD 18 trillion per tahun)

Perlunya dukungan pemerintah untuk mengubah preferensi investor dari investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang

Rendahnya efisiensi public financing karena masalah alokatif dan distributif.

Sebagian besar aliran dana internasional terfokus pada beberapa negara emerging market

#### The impact of domestic and international environments.

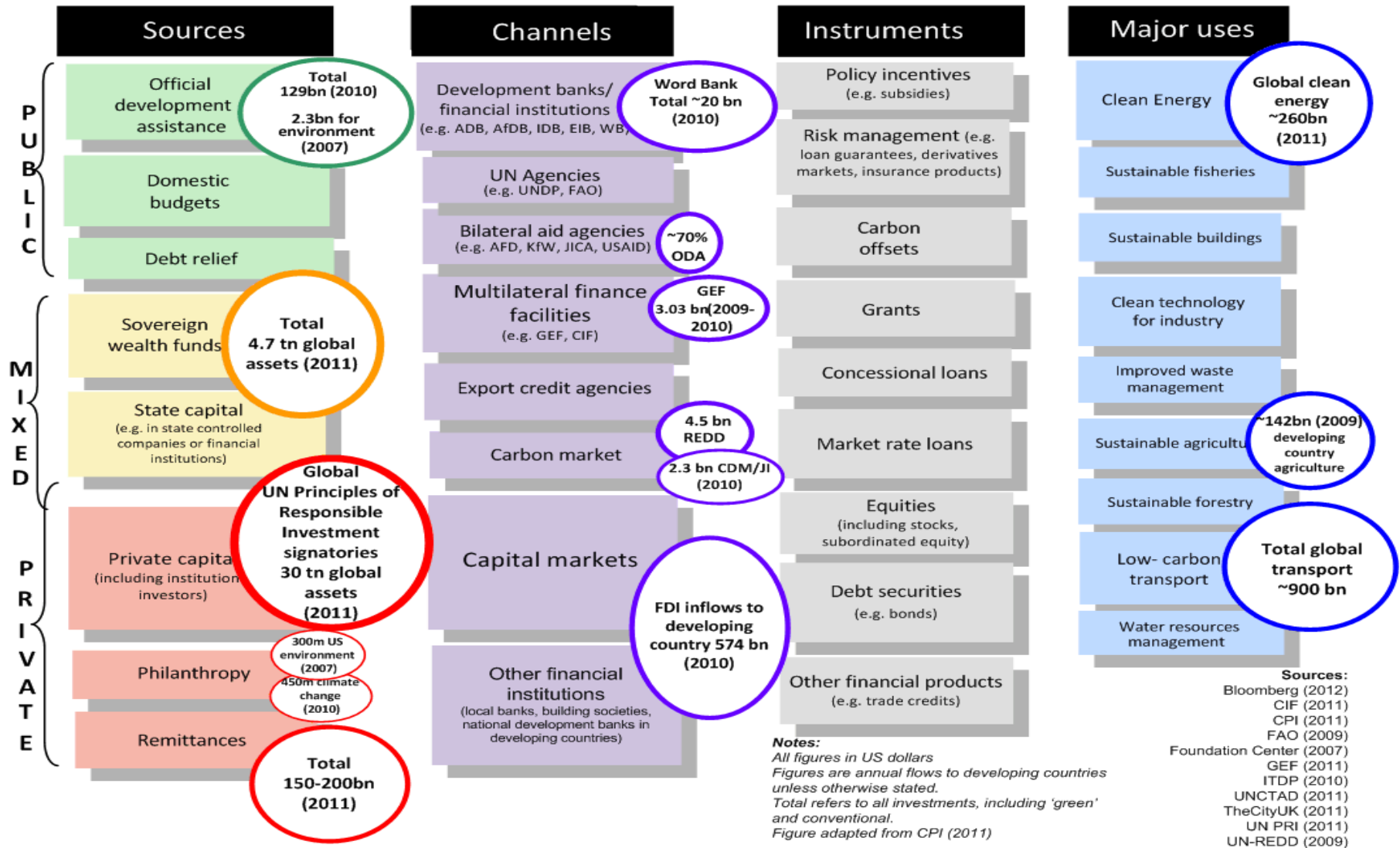
Domestic Resource Mobilisation (DRM) (seperti peningkatan pajak) pada negara-negara berkembang masih merupakan masalah yang berat.

Semakin tingginya tuntutan untuk *better country targeting* untuk pemanfaatan ODA.

Krisis ekonomi global dan berkembangnya isu lain, selain MDG, menurunkan aliran dana publik untuk pembangunan kebutuhan dasar negara berkembang



# Finance Flows for SDG



Sumber : Finance for the Transition to a Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication, Rio+2- 2012 Issues Brief, UNCSD Secretariat

# LINGKUP PEMBAHASAN IGSDF

## PEMIKIRAN YANG BERKEMBANG

### CLUSTER-2

#### National Public Financing Sources.

Potensi Domestic Resource Mobilisation (Pajak, dll)

Alternatif pembiayaan melalui perbankan dan pasar modal.

**Potensi pembiayaan Government Bond dan Local Government Bond**

#### International Public Financing Sources.

Mengkaji potensi ODA, SWF dan MDB's instruments

Mengkaji peningkatan FDI dan perdagangan internasional

Mengkaji potensi South-South and Triangular Cooperation

#### National and International Private Financing Sources.

Identifikasi karakteristik doinan iklim bisnis

Upaya perbaikan data dan informasi mengenai potensi sektor swasta

#### Blending Public and Private Financing Sources.

Mengkaji praktik-praktik blending financing yang sukses maupun yang gagal.

Mengkaji fasilitasi sharing experiences yang dibutuhkan.

#### Relationship between different Financing Sources.

Opsi-opsi peningkatan efektivitas dan efisiensi berbagai sumber, saluran dan instrumen pendanaan

# LINGKUP PEMBAHASAN IGSDF

## PEMIKIRAN YANG BERKEMBANG

### CLUSTER-3

#### Institutional arrangements.

Mengembangkan kelembagaan yang optimal untuk menjamin tercapainya target pembiayaan SDG

#### Policy coherence.

Langkah-langkah untuk tercapainya koherensi kebijakan (public, private, domestic, international)

Dukungan sistem lainnya, misalnya procurement

#### Synergies and governance issues.

Mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi isu global governance  
Dan mengembangkan sinergi antara berbagai sumber, saluran dan saluran pendanaan SDG

# BEBERAPA ISU PENTING BAGI INDONESIA

1. Meningkatkan sumber pendanaan secara global, termasuk mengembangkan sumber pendanaan baru, dan meningkatkan efektivitas serta sinergi penggunaan dana (penyaluran, instrumen dan prioritas sektor)– Capital Market, CSR, dsbnya.
2. Indonesia, mendukung tuntutan pemenuhan komitmen ODA negara-negara maju (0,7% GNI) sesuai *Monterey Consensus*, dan kewajiban global lain bagi terciptanya Pembangunan yang Berkelanjutan, misalnya terkait pendanaan perubahan iklim, komitmen dalam perundingan WTO, dan sebagainya.
  - Upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah prioritas utama bagi negara-negara berkembang. Pembiayaan untuk *Green* adalah tambahan dan memerlukan dukungan sepenuhnya negara maju dan IFI.
3. Pendanaan publik, baik internasional maupun domestik, harus semakin diarahkan untuk meningkatkan investasi swasta (*leveraging*).
4. Peningkatan potensi pendanaan untuk fasilitasi *knowledge sharing* seperti melalui *South-South and Triangular Cooperation*.
5. Perlunya upaya internasional untuk menghilangkan/mengurangi *illicit flows* (aliran dana hasil korupsi, illegal logging/fishing, *transfer pricing*, dan sebagainya) misalnya dengan semakin mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pertukaran data/informasi pajak, mendorong komitmen MNC dan negara maju terhadap EATI.
6. ODA, *non concessional*, masih diperlukan bagi *Middle Income Countries* terutama untuk keluar/terhindar dari *Middle Income Trap* → infrastruktur (*Direct Lending, PPP*), *transfer technology, membangun sistem dan memperbaiki governance*.
7. Perbaiki *global governance* dan peningkatan *global partnership* dalam pendanaan SD.

# TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

1. Menyusun posisi nasional bersama yang konsisten dalam berbagai proses internasional mengenai Pembangunan Berkelanjutan, berdasarkan arah dan tujuan nasional pembangunan Indonesia → Meningkatkan koordinasi internal, Pemerintah dan Non Pemerintah (Sekretariat Bersama)
2. Mengintegrasikan komitmen internasional tersebut ke dalam langkah-langkah pembangunan nasional (antara lain RPJMN, RPJMD)
3. Peran aktif Indonesia diperlukan untuk menjembatani perbedaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang, terkait pendanaan pembangunan berkelanjutan → Partisipasi dan melakukan *outreach*

**TERIMA KASIH**